UNIVERSITAS GADJAH MADA

Mengurai Benang Kusut Tingginya Pengangguran Terdidik di Era Melimpahnya Lapangan Pekerjaan

Executive Summary

Meningkatnya lulusan Pendidikan tinggi yakni 8,55% dari total lulusan, tidak selaras dengan angka pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja kini menjadi paradoks ketenagakerjaan yang harus di alami oleh Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh ketidaksesuaian kompetensi (skill mismatch), lemahnya pengalaman praktis, rendahnya soft skills, kualitas pendidikan tinggi yang tidak merata, hingga ketimpangan kompetensi digital dan kini diperparah dengan pertumbuhan industri digital yang lebih cepat daripada adaptasi kurikulum kampus. Dampaknya meluas pada daya saing nasional, produktivitas tenaga kerja, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pendidikan tinggi. Policy brief ini menawarkan agenda kebijakan terintegrasi untuk memperbaiki ekosistem kesiapan kerja melalui sinkronisasi kurikulum berbasis demand, peningkatan job readiness, digital upskilling, penguatan career center, serta sistem penempatan kerja berbasis AI.

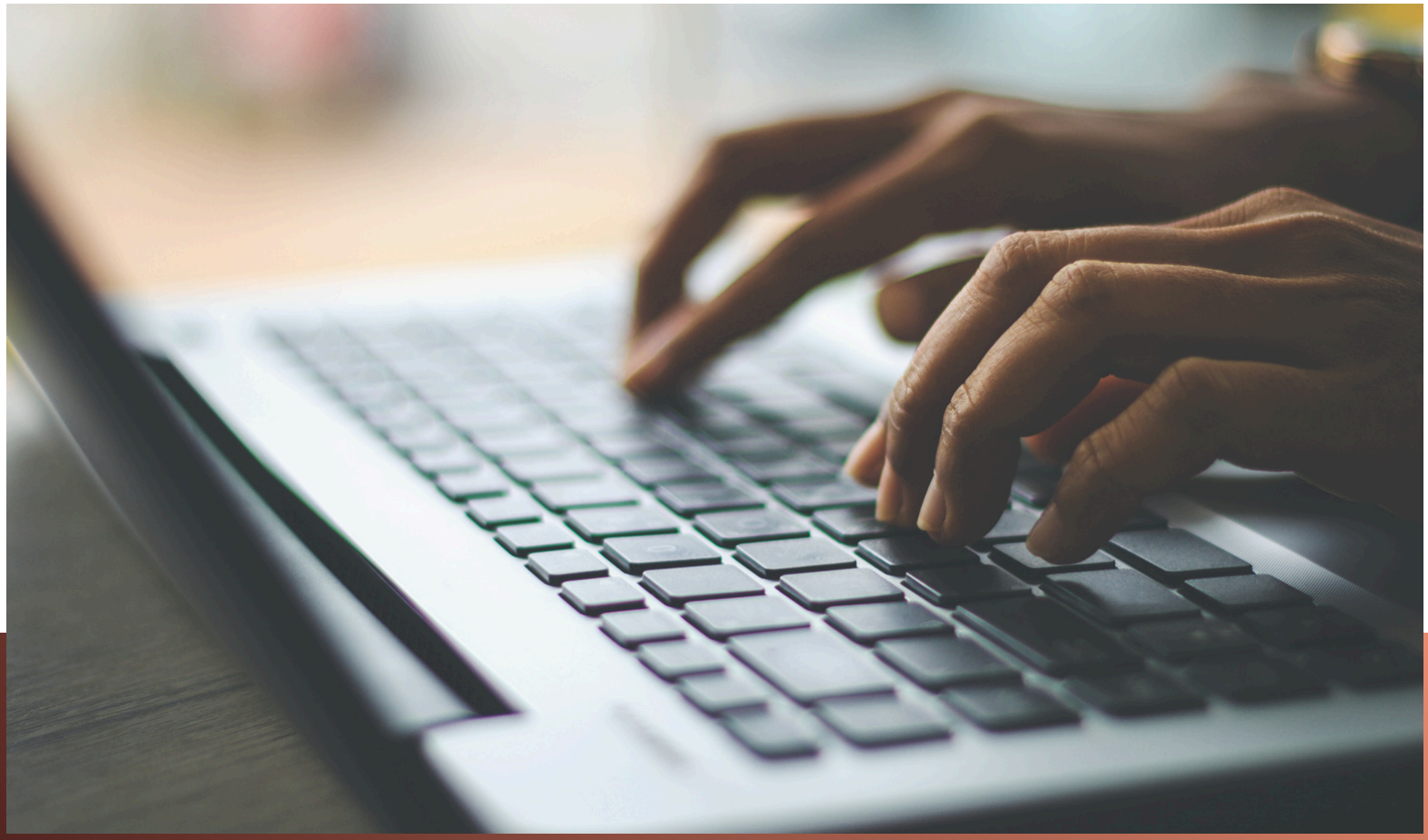

Nur Fauzi Zaahirah
Magister Ilmu Administrasi Publik
+6285340394270
nurfauzizaahirah@mail.ugm.ac.id

Isu dan Permasalahan Utama

Tingginya pengangguran terdidik di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, total pengangguran tercatat 7,28 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,76%. BPS Menyebutkan distribusi berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) serta perguruan tinggi mendominasi kelompok penganggur, yang mana tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi mencapai 13,89% angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional sebesar 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang.

Fenomena ini juga menggambarkan adanya ketidaksesuaian mendasar antara output pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru memasuki pasar kerja, namun penciptaan pekerjaan formal tidak tumbuh secepat itu. Akibatnya terjadi kelebihan suplai tenaga kerja terdidik, terutama pada bidang yang pasarnya stagnan seperti administrasi, manajemen, dan pendidikan. Banyak lulusan terpaksa bersaing pada ruang kerja yang sempit dan tidak proporsional dengan jumlah pencari kerja. Ketidakseimbangan ini terlihat dari meningkatnya persaingan pada pekerjaan yang semakin menuntut pengalaman kerja, padahal mayoritas lulusan tidak memiliki rekam jejak profesional yang memadai. Kondisi ini semakin memperjelas kesenjangan pendidikan dan kebutuhan industri, terlebih ketika teknologi dan digitalisasi mengubah profil pekerjaan lebih cepat dibandingkan kemampuan lembaga pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum.

Tingginya pengangguran terdidik merupakan masalah kompleks yang tidak terjadi dalam sekejap. faktor penyebab, pengangguran terdidik juga lahir dari interaksi berlapis antara sistem pendidikan, dinamika pasar kerja, keterbatasan kebijakan, dan perubahan teknologi. Jika tidak ditangani secara serius, fenomena ini berpotensi memicu pemborosan sumber daya manusia, ketidakpuasan sosial, dan kehilangan bonus demografi yang sangat berharga bagi masa depan Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ouput pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Angka diatas menjadi bukti bahwa meskipun memiliki pendidikan tinggi, tidak semua lulusan berhasil terserap pasar kerja sesuai dengan kompetensi dan harapan.

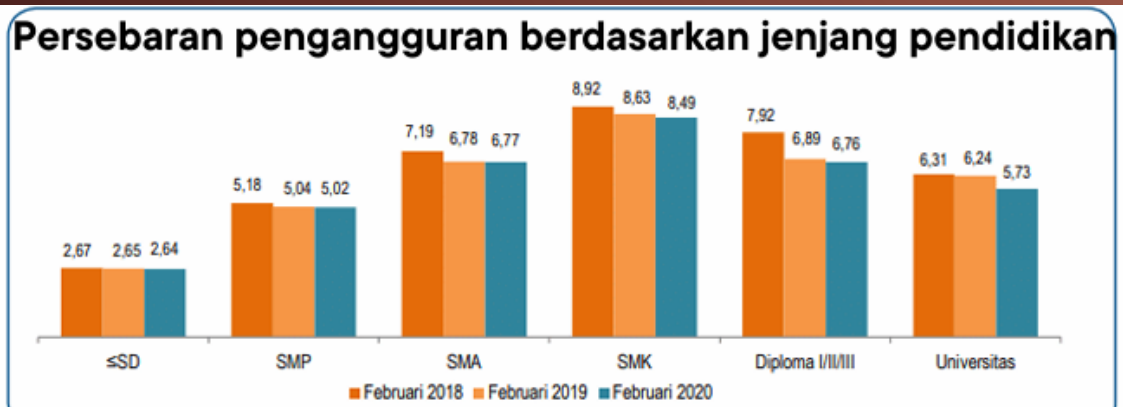

Apa Penyebabnya?

1. Skill Mismatch Struktural yang Semakin Melebar

Mismatch tidak hanya terjadi karena ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, tetapi juga karena perubahan sifat pekerjaan (task-based transition) yang menuntut digital fluency, kemampuan analitis, dan literasi data. Banyak lulusan masih dipersiapkan untuk knowledge-based economy, padahal industri bergerak ke skill-based and competency-based economy. Riset dengan data Sakernas dan studi Axxelina (2024) menunjukkan mismatch tertinggi terjadi pada lulusan ilmu sosial dan pendidikan, di mana hanya sebagian yang bekerja di bidang relevan. Hasil Survey populix (2023) menyebutkan bahwa banyak perusahaan kesulitan menemukan pelamar dengan keterampilan teknis dan soft skills yang sesuai sekitar 50% perusahaan menyebut kemampuan teknis pelamar rendah, dan 35% menyatakan soft skills tidak memadai baik teknis maupun non teknis

Regulasi dan Program

01. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
02. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar
03. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
04. Program Kartu Prakerja
05. Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Meskipun, Persentase TPT menurun tepat saat penyelenggaraan Kartu Prakerja kenyataannya data BPS menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan perguruan tinggi tetap berada pada kisaran 5–7% selama 2019–2024, menandakan adanya mismatch struktural yang tidak terselesaikan oleh kebijakan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah terkoordinasi, dan ada, kesenjangan kelembagaan, implementasi pengangguran terdidik tetap menjadi permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani.

Sebelum dan Sesudah Prakerja

Tahun	TPT%	status
2020	7.07%	Sebelum pra-kerja
2021	6.49	Sesudah
2022	5.86	Sesudah
2023	5.32	Sesudah
2024	5.23	Sesudah

Data TPT Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

2. Pertumbuhan Pendidikan Tinggi tidak selaras dengan Pertumbuhan Pekerjaan Formal

Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru memasuki pasar kerja, sementara penciptaan pekerjaan formal bergerak lebih lambat. Akibatnya terjadi suplai berlebih, terutama pada bidang yang pasarnya stagnan seperti administrasi publik, manajemen, dan pendidikan. dari sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dari total pekerja nasional (144,64 juta pada Agustus 2024), peningkatan pekerja terjadi hampir di semua tingkat pendidikan namun mayoritas pekerja tetap berada di sektor informal

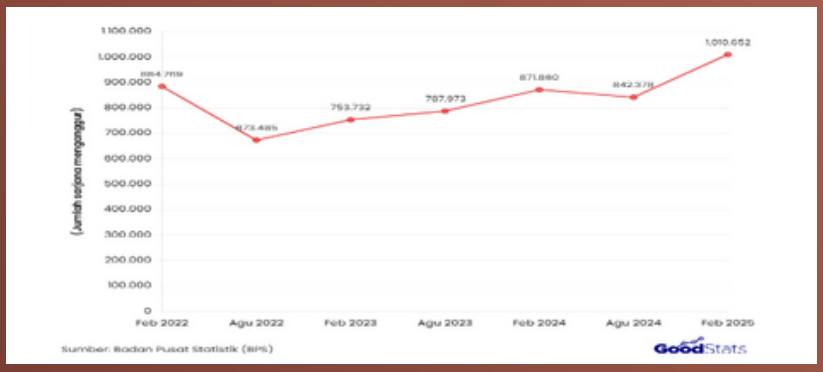

Grafik Pengangguran Terdidik
Sumber:Badan Pusat Statistik (2025)

Puncak Pengangguran tertinggi terjadi pada Februari 2025, dengan lebih dari satu juta penganggur, atau 1.010.652 orang. Ini merupakan angka tertinggi dalam empat tahun. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa tantangan angkatan kerja saat ini semakin kompleks.

3. Ketimpangan Kompetensi Digital

Aspek Digitalisasi memperparah kesenjangan tersebut. OECD (2024) menyebutkan bahwa kurang dari 1% tenaga kerja memiliki digital skills lanjutan, yang mana di era industri 4.0 transformasi digital menjadi begitu massif dan membutuhkan kompetensi digital. Nababan (2023) menyebutkan bahwa, struktur penyerapan tenaga kerja di sektor formal relatif stagnan atau bahkan menurun, beberapa subsektor bahkan menunjukkan pola daya serap tenaga kerja yang tidak sebanding meskipun produktivitas meningkat. kondisi tersebut yang menyebabkan lulusan berharap ke pekerjaan formal sulit mendapatkan peluang, terutama apabila mereka tidak memiliki kompetensi yang spesifik atau pengalaman praktis yang relevan.

Dampak tingginya Pengangguran Terdidik

a. Pemborosan sumber daya.

Tingginya pengangguran terdidik berarti investasi besar dalam Pendidikan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, sehingga sumber daya yang telah dikeluarkan untuk mendidik tenaga kerja menjadi sia-sia.

b. dampak social dan psikologis.

Pengangguran terdidik dapat menimbulkan stress, kecemasan, dan ketidakstabilan sosial. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan masalah social seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial

Dampak tingginya Pengangguran Terdidik

c. Persepsi negative dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pendidikan

Masyarakat cenderung memandang Pendidikan tinggi kurang bernilai apabila lulusan sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat menurunkan motivasi belajar dan kepercayaan terhadap sistem Pendidikan

d. kebijakan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi.

Studi menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong perusahaan mengurangi tenaga kerja sehingga meningkatkan pengangguran terdidik, sementara pertumbuhan ekonomi yang positif dapat pengangguran terdidik

Rekomendasi Kebijakan

1. Harmonisasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja

Kemendikbudristek perlu menetapkan pedoman pembaruan kurikulum yang mewajibkan setiap program studi melakukan peninjauan secara berkala berdasarkan data kebutuhan tenaga kerja dari Kemenaker dan BNSP sehingga kurikulum selalu relevan terhadap permintaan industri. Selain itu perguruan tinggi perlu menambahkan mata kuliah berbasis proyek yang dirancang bersama sektor industri agar mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam situasi kerja. Harmonisasi Kurikulum ini penting untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi nasional. Pendekatan ini meniru model SkillsFuture di Singapura yang terbukti efektif mengurangi mismatch kompetensi. Pelaksana utama kebijakan ini adalah Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LAM dan asosiasi industri yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan kesinambungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

2. Program Digital Upskilling Terintegrasi

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kominfo dan Kemendikbudristek perlu menyediakan kurikulum pelatihan digital yang mencakup literasi dasar, penguasaan perangkat digital produktif, keamanan siber, analitik data, serta teknologi komputasi awan yang saat ini menjadi kebutuhan utama berbagai bidang industri. Untuk mewujudukan hal tersebut Kemenaker perlu memperluas pusat pelatihan berbasis digital di daerah agar lulusan dari wilayah terpencil memiliki akses yang adil. Kominfo dapat menyediakan sertifikasi yang diakui industri untuk memastikan kompetensi lulusan diterima secara luas. Pendekatan ini sejalan dengan DigComp Framework Uni Eropa yang berhasil meningkatkan kesiapan kerja generasi muda. Pelaksana kebijakan ini adalah Kemenaker, Kominfo dan Perguruan Tinggi.

3. Program Link and Match UMKM Lulusan Berbasis Proyek

Kementerian Koperasi dan UKM bersama pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan kompetensi UMKM dan menyediakan platform pencocokan talenta berbasis kecerdasan buatan untuk mempertemukan lulusan dengan UMKM yang membutuhkan dukungan profesional. Penempatan dilakukan melalui tugas berbasis proyek selama tiga sampai enam bulan yang meliputi pemasaran digital, desain produk, manajemen keuangan atau transformasi digital UMKM. Model seperti SME Talent Pipeline di Korea Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan lulusan mampu meningkatkan produktivitas UMKM dan mempercepat transisi lulusan masuk dunia kerja. Pelaksana utama kebijakan ini adalah KemenkopUKM, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

Sumber

Antara News. (2024). Qualification skills mismatch ailing job market, says study. Antara News. , Badan Pusat Statistik (BPS). (2024a). Tingkat Pengangguran Terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan (2019–2024). BPS RI. ,njn OECD. (2024). OECD Economic Surveys: Indonesia 2024. OECD Publishing. ,njn Nababan, M. (2023). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka dan implikasinya terhadap ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Sosial dan Humaniora, 14(2), 112–128.